

**PENGARUH ISU POLITIK TERHADAP *CIVIC KNOWLEDGE*
MAHASISWA PPKn UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**Nuraini Fitriana
NPM 2213032009**



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGARUH ISU POLITIK TERHADAP *CIVIC KNOWLEDGE* MAHASISWA PPKn UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

NURAINI FITRIANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh isu politik terhadap *civic knowledge* mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Lampung. Perkembangan isu politik nasional yang semakin intens melalui media sosial dan media massa memberikan paparan informasi yang luas kepada mahasiswa. Namun, tingginya intensitas konsumsi informasi politik belum tentu diikuti dengan peningkatan kualitas pemahaman kewarganegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada hubungan antara paparan isu politik dengan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep demokrasi, sistem politik dan pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah mahasiswa PPKn Universitas Lampung, dengan sampel sebanyak 65 mahasiswa angkatan 2023 dan 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket untuk mengukur tingkat paparan isu politik dan tes objektif untuk mengukur *civic knowledge*. Data dianalisis menggunakan uji prasyarat dan regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel isu politik terhadap *civic knowledge* mahasiswa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu politik berpengaruh secara signifikan terhadap *civic knowledge* mahasiswa. Pemahaman terhadap isu politik yang berkembang mampu memperkuat pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa dalam memahami konsep politik, demokrasi, dan peran warga negara. Dengan demikian, isu politik dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran kontekstual dalam penguatan *civic knowledge* mahasiswa.

Kata Kunci: Isu Politik, *Civic Knowledge*, Mahasiswa PPKn

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF POLITICAL ISSUES ON CIVIC KNOWLEDGE OF PPKn STUDENTS UNIVERSITY OF LAMPUNG

BY

NURAINI FITRIANA

This study aims to determine the influence of political issues on the civic knowledge of students in the Pancasila and Citizenship Education (PPKn) Study Program at the University of Lampung. The increasingly intense development of national political issues through social and mass media provides students with extensive information exposure. However, this high level of political information consumption does not necessarily translate into improved civic understanding. Therefore, this study focuses on the relationship between exposure to political issues and students' ability to understand the concepts of democracy, the political system and government, and the rights and obligations of citizens. This study used a quantitative method with a survey approach. The study population was PPKn students at the University of Lampung, with a sample size of 65 students from the classes of 2023 and 2024. Data collection techniques used a questionnaire to measure exposure to political issues and an objective test to measure civic knowledge. Data were analyzed using prerequisite tests and simple linear regression to determine the effect of political issues on students' civic knowledge. The results showed that political issues significantly influenced students' civic knowledge. Understanding evolving political issues strengthened students' civic knowledge, which enabled them to grasp the concepts of politics, democracy, and the role of citizens. Thus, political issues can be used as a contextual learning tool to strengthen students' civic knowledge.

Keywords: *Political Issues, Civic Knowledge, Civies Students*

**PENGARUH ISU POLITIK TERHADAP *CIVIC KNOWLEDGE*
MAHASISWA PPKn UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh

NURAINI FITRIANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PENGARUH ISU POLITIK TERHADAP *CIVIC KNOWLEDGE* MAHASISWA PPKn
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Nuraini Fitriana**

NPM

: **2213032009**

Program Studi

: **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan

: **Pendidikan IPS**

Fakultas

: **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Drs. Berchan Pitoewas, M.H.
NIP 1961121419930310001

Pembimbing II,



Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.
NIP 19840309 202521 1 055

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial



Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Koordinator Program Studi
Pendidikan PKN



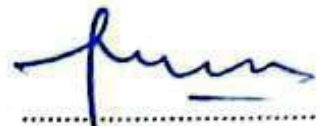
Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.



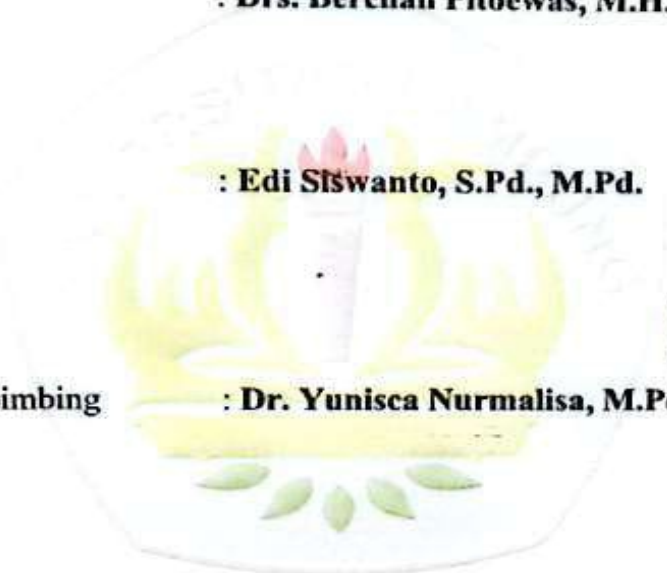
Sekretaris

: Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.



Penguji
Bukan Pembimbing

: Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Albert Maydiantoro, M.Pd.
NIP 19870504 201404 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Nuraini Fitriana
NPM : 2213032009
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Dusun 1 Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.



Bandar Lampung, 4 Maret 2026

Nuraini Fitriana
Nuraini Fitriana

NPM 2213032009

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nuraini Fitriana yang dilahirkan di Terbanggi Subing pada tanggal 14 November 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara sebagai buah cinta kasih dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Suriyah.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. TK Mandiri Satu Atap yang lulus pada tahun 2010
2. SD Negeri 1 Terbanggi Subing yang lulus pada tahun 2016
3. SMP Negeri 4 Gunung Sugih yang lulus pada tahun 2019
4. MA Negeri 1 Lampung Tengah yang lulus pada tahun 2022

Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswi di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA) sebagai anggota Divisi Minat dan Bakat pada periode tahun 2022-2023, dan pada periode tahun 2024 dipercaya untuk menjadi Sekretaris Divisi Minat dan Bakat Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA). Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekaligus Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat 2025.

MOTTO

“Setiap kesulitan selalu disertai dengan kemudahan bagi mereka yang bersabar dan tidak menyerah.”

(QS. Al-Insyirah: 5–6)

Maka

“Kesabaran bukan tentang menunggu tanpa bergerak, melainkan tetap berusaha sambil percaya”

(Nuraini Fitriana)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh cinta, rasa hormat, dan syukur yang tak terhingga kepada dua sosok paling berharga dalam hidup saya: Bapak Sutrisno dan Ibu Suriyah tercinta. Kalian adalah alasan mengapa saya bisa berdiri sampai di titik ini, menyelesaikan satu tahap penting dalam perjalanan hidup dan pendidikan saya. Terima kasih atas setiap doa yang kalian panjatkan dalam diam, setiap peluh dan letih yang tak pernah kalian keluhkan, serta setiap pengorbanan yang mungkin tak akan pernah mampu saya balas dengan apa pun di dunia ini. Tidak ada satu pun capaian dalam hidup saya yang berdiri sendiri tanpa doa, didikan, dan cinta kalian. Semoga skripsi ini, meskipun sederhana, dapat menjadi salah satu wujud nyata dari usaha saya dalam mewujudkan harapan kalian. Semoga suatu saat, saya bisa membuat kalian bangga, sebagaimana kalian telah membuat saya begitu bersyukur menjadi anak kalian.

Serta Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Isu Politik Terhadap Civic Knowledge Mahasiswa PPKn Universitas Lampung”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spriritual serta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Riswandi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung selaku Pembahas I. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta selalu memberikan motivasi, saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku Pembimbing I saya. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan juga pikiran untuk membimbing, memberi masukan, saran dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik (PA) dan Pembimbing II. Terima kasih telah membimbing, meluangkan waktu, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Karyadi Hidayat, M.Pd., selaku Pembahas II. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu, terimakasih atas saran dan masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran dan segala bantuan yang telah diberikan;
11. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibu Suriyah. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti dipanjatkan, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, serta dukungan moral maupun materi yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya. Kesabaran, keikhlasan, dan nasihat yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu wujud bakti dan kebanggaan saya kepada Bapak dan Mamak;
12. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur, bangga, dan haru kepada diri saya sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah hingga mampu menyelesaikan satu tahap penting dalam perjalanan pendidikan ini. Terima kasih atas setiap usaha yang tidak pernah terlihat orang lain, atas setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, atas setiap lelah yang disembunyikan di balik

senyum, serta atas setiap air mata yang jatuh namun tidak pernah membuat langkah ini berhenti. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelesaikan skripsi, tetapi tentang proses menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih memahami arti perjuangan.

13. Terima kasih untuk kakak saya Heni Febriani yang saya sayangi dan saya banggakan selalu menjadi tempat berbagi, memberi semangat di saat lelah, serta menjadi contoh dan penguat langkah saya. Nasihat, bantuan, dan kepercayaan yang diberikan menjadi penguat bagi saya untuk terus melangkah dan tidak mudah menyerah. Tak lupa untuk adikku tersayang Rafif Al Azzam, terima kasih telah menjadi penyemangat dengan caranya sendiri memberi warna, tawa, dan alasan bagi saya untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Semoga apa yang saya capai hari ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagimu di masa depan;
14. Teman-teman seperjuangan saya (Virda Septiani, Rifka Silmia Salsha Bella, Novia Irmani Putri, Aisyah Suci Ningrum, Anggita Aprilia, Irawati, Destri Nur Fadhillah, Az-zahra Saputri, Dewi Amelia Putri, Setiawan, Agus Rizki Alfalah dan Febri Heriyanto), yang telah menemani perjalanan akademik ini dengan kebersamaan, canda, diskusi, serta saling menguatkan dalam suka maupun duka. Terima kasih atas dukungan, kerja sama, dan kenangan yang telah tercipta. Semoga kebersamaan dan silaturahmi tetap terjalin dengan baik, meskipun kelak kita melangkah di kota yang berbeda dan impian yang berbeda;
15. Teman-teman program studi PPKn angkatan 2022 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya, kenangannya dalam suka maupun duka serta pengalaman berharga selama perkuliahan;
16. Teman-teman Fordika, khususnya pada kepengurusan Kabinet Rakhsabinaya. Terima kasih atas pengalaman dan kesempatan yang berharga selama menjadi bagian dari kepengurusan dan kepanitiaan yang ada di Fordika;
17. Teman-teman KKN Desa Murni Jaya, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terima kasih atas pengalaman, suka duka, cerita dan kebersamaannya selama 40 hari pada saat KKN dan PLP;

18. Serta semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan semua mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 4 Maret 2026
Penulis

Nuraini Fitriana
2213032009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Isu Politik Terhadap *Civic knowledge* Mahasiswa PPKn Universitas Lampung” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang serta semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 4 Maret 2026
Penulis

Nuraini Fitriana
NPM. 2213032009

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	viii
HALAMAN PERSETUJUAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Kegunaan Penelitian.....	7
A. Kegunaan Secara Teoritis	7
B. Kegunaan Secara Praktis.....	7

1.7 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
A. Ruang Lingkup Ilmu	8
B. Ruang Lingkup Subjek Penelitian.....	8
C. Ruang Lingkup Objek Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Tempat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Waktu Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Deskripsi Teori.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Isu Politik.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Civic knowledge</i>	18
2.2 Kajian Penelitian yang Relevan	23
2.3 Kerangka Berpikir.....	26
2.4 Hipotesis Penelitian.....	28
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Metodologi Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel	29
A. Populasi.....	29
B. Sampel.....	29
3.3 Variabel Penelitian.....	31
3.4 Definisi Konseptual dan Operasional.....	32
A. Definisi Konseptual.....	32
B. Definisi Operasional.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
A. Teknik Pokok	33
B. Teknik Penunjang.....	35
3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	35
A. Uji Validitas	35
B. Uji Reliabilitas	39
3.7 Instrumen Penelitian.....	41
A. Angket.....	41
B. Tes.....	44

C. Wawancara.....	46
3.8 Teknik Analisis Data.....	50
A. Analisis Distribusi Frekuensi	50
B. Uji Prasyarat Analisis.....	52
C. Analisis Data	53
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Langkah Langkah Penelitian.....	55
A. Persiapan Pengajuan Judul	55
B. Penelitian Pendahuluan	55
C. Pengajuan Rencana Penelitian	56
D. Penyusunan Alat Pengumpulan Data	56
E. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian	57
F. Pelaksanaan Penelitian	65
4.2 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	66
A. Profil Progam Studi PPKn Universitas Lampung.....	66
B. Visi dan Misi Program Studi PPKn Universitas Lampung.....	66
C. Tujuan Progam Studi PPKn Universitas Lampung.....	67
D. Sarana dan Prasarana Program Studi PPKn Universitas Lampung	68
4.3 Deskripsi Data Penelitian.....	69
A. Pengumpulan Data	69
B. Penyajian Data	69
2. Penyajian Data Indikator <i>Civic Knowledge</i> (Variabel Y).....	77
4.4 Hasil Analisis Data.....	84
A. Hasil Uji Prasyarat	84
B. Hasil Uji Hipotesis	86
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	88
A. Isu Politik (Variabel X).....	88
B. <i>Civic Knowledge</i> (Variabel Y).....	92
C. Pengaruh Isu Politik (Variabel X) Terhadap <i>Civic Knowledge</i> (Variabel Y) 96	
4.6 Keterbatasan Penelitian.....	100

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Klasifikasi Daya Pembeda Butir Tes	39
Tabel 2. Indeks Koefisien Reliabilitas	40
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Angket Isu Politik	42
Tabel 4. Kisi-Kisi Tes Civic Knowledge	45
Tabel 5. Tabel Pedoman kisi- kisi wawancara untuk isu politik	47
Tabel 6. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Kemampuan Civic Knowledge.....	49
Tabel 7. Uji Validitas Angket Variabel X Kepada 10 Responden Di Luar Sampel ..	58
Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Angket Kepada 10 Responden di Luar Sampel Penelitian.....	59
Tabel 9. Uji Validitas Tes Kepada 10 Responden Di Luar Sampel.....	61
Tabel 10. Reliabilitas Instrument Tes Kepada 10 Responden Di Luar Sampel.....	62
Tabel 11. Uji Tingkat Kesukaran	63
Tabel 12. Uji Daya Pembeda	64
Tabel 13. Sarana dan Prasarana Program Studi PPKn.....	68
Tabel 14. Distribusi Frekuensi Angket Indikator Isu Politik sebagai Masalah.....	71
Tabel 15. Distribusi Frekuensi Angket Indikator Literasi Politik.....	73
Tabel 16. Distribusi Frekuensi Angket Indikator Dimensi Kekuasaan.....	74
Tabel 17. Distribusi Frekuensi Angket Indikator Isu Politik Sebagai Kebijakan Publik	76
Tabel 18. Distribusi Kategori Tes Indikator Pemahaman Prinsip Demokrasi	78
Tabel 19. Distribusi Kategori Tes Pemahaman Sistem Politik dan Pemerintahan	80
Tabel 20. Distribusi Kategori Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara	81
Tabel 21. Distribusi Kategori Peran dalam Kehidupan Demokrasi.....	83
Tabel 22. Hasil Uji Normalitas Data Penelitian Menggunakan SPSS Versi 27	84
Tabel 23. Hasil Uji Linieritas data penelitian menggunakan SPSS versi 27	85
Tabel 24. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana data penelitian menggunakan SPSS versi 27.....	86
Tabel 25. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana data penelitian menggunakan SPSS versi 27	87

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir	28

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
1. Surat Izin Penelitian Pendahuluan	108
2. Surat Izin Penelitian	110
3. Surat Balasan Penelitian.....	112
4. Uji Instrumen Diluar Responden	114
5. Uji Coba Instrumen Penelitian	119
6. Instrumen Penelitian.....	125
7. Data Uji Angket dan Tes	142
8. Uji Prasyarat.....	158
9. Uji Hipotesis	161

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Salah satu aspek utama dalam pendidikan kewarganegaraan adalah *civic knowledge*, yakni pengetahuan tentang prinsip dasar bernegara, demokrasi, hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem politik yang berlaku. *Civic knowledge* tidak hanya menjadi fondasi dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi bekal bagi generasi muda dalam berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.

Perkembangan era digital membawa perubahan signifikan dalam cara mahasiswa memperoleh informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan isu-isu politik. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z memiliki akses yang luas terhadap berbagai informasi politik melalui media massa dan media sosial. Isu-isu politik yang berkembang di masyarakat, seperti pemilu, kebijakan publik, dinamika pemerintahan, hingga konflik politik, turut membentuk cara pandang mahasiswa terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Kondisi ini menjadikan isu politik sebagai salah satu sumber pembelajaran informal yang berpotensi memperluas wawasan kewarganegaraan mahasiswa.

Pentingnya meningkatkan *civic knowledge* bagi mahasiswa juga didorong oleh tantangan globalisasi dan arus informasi digital. Akses informasi yang begitu luas menuntut kemampuan mahasiswa dalam memilah fakta, opini, dan hoaks agar tidak terjebak dalam pola pikir sempit. Mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan lebih siap untuk memahami isu-isu kebangsaan, termasuk isu

politik yang berkembang di tengah masyarakat. Rendahnya keterampilan ini berpotensi melemahkan kualitas *civic knowledge* mahasiswa, yang seharusnya menjadi fondasi dalam membangun partisipasi demokratis. Masalah semakin terlihat ketika mahasiswa cenderung menerima informasi politik secara langsung tanpa melalui proses analisis, verifikasi, dan diskusi kritis. Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian pendahuluan di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung, ditemukan bahwa sebagian mahasiswa lebih sering memahami isu politik sebatas pada isi informasi yang diterima, tanpa mampu mengaitkannya dengan konsep, teori, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Akibatnya, pemahaman *civic knowledge* mahasiswa masih bersifat permukaan dan belum menunjukkan kemampuan analitis yang memadai serta belum mampu mengaitkan isu politik dengan analisis konseptual serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingginya konsumsi informasi politik tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas *civic knowledge*. Sebagian mahasiswa PPKn Universitas Lampung belum menunjukkan tingkat kepekaan dan sikap kritis yang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa pendidikan kewarganegaraan. Informasi politik yang diterima sering kali hanya memicu reaksi emosional berupa dukungan atau penolakan, tanpa disertai argumentasi rasional dan pemahaman mendalam terhadap sistem politik dan demokrasi.

Keberagaman pandangan dan narasi politik yang berkembang di masyarakat menjadi bagian dari realitas kehidupan generasi muda saat ini. Mahasiswa sebagai kelompok terdidik dihadapkan pada tuntutan untuk mampu memahami, menilai, dan merespons isu politik secara rasional. Namun, keterbukaan informasi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi politik mahasiswa. Politik masih sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang rumit dan kurang menarik, sehingga tidak sedikit mahasiswa yang enggan terlibat dalam diskusi politik secara mendalam..

Pengetahuan mengenai literasi digital sangat krusial sebagai bekal untuk memilah dan menyebarkan konten media dengan tepat, sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan maksud yang diinginkan (Restianty, 2018: 72). Menggunakan teknologi untuk berinteraksi atau berkomunikasi setiap hari, setiap orang perlu waspada dan memiliki keterampilan terkait literasi digital, termasuk cara berkomunikasi secara etis dan pemahaman tentang waktu serta cara yang tepat dalam menggunakan teknologi. Paul Gilster dalam Veronika dkk., (2022), literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi dalam berbagai format yang diperoleh dari berbagai sumber melalui media sosial. Ini menunjukkan bahwa literasi digital mencakup kemampuan untuk mengumpulkan, memahami, dan menerapkan pengetahuan digital dari beragam sumber. Sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan terutama *civic knowledge* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat mendukung mahasiswa dalam memahami isu-isu kewarganegaraan yang relevan dan berdasarkan fakta.

Paparan isu politik melalui media sosial telah memengaruhi kualitas berpikir kritis mahasiswa. Sebuah penelitian oleh Hasan (2024) menemukan bahwa mahasiswa aktif di TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook menggunakan konten politik bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga sebagai media diskusi dan evaluasi kritis atas isu kewarganegaraan. Sekarang karakter konten politik di Indonesia sering bersifat provokatif dan beropini kuat, sehingga mendorong mahasiswa untuk segera merespons namun tidak selalu dengan analisis mendalam. Di samping itu, literasi media digital di kalangan mahasiswa masih rendah, yang memicu ketimpangan antara kemampuan konsumsi dan evaluasi kritis konten. Dampaknya secara nasional sangat beragam mahasiswa yang lebih aktif berdiskusi dan terpapar informasi politik terverifikasi secara signifikan menunjukkan peningkatan kemampuan kesadaran kontekstual soal *civic knowledge*. Sebaliknya, mereka yang hanya menerima opini tanpa analisis mengalami penurunan kemampuan pengujian argumen, evaluasi fakta, dan

kesadaran nilai-nilai konstitusional.

Mengenai *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung dalam menanggapi isu politik juga tercermin dalam beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengangkat variabel utama yaitu Pengaruh Isu Politik Terhadap *Civic Knowledge* Mahasiswa PPKn Universitas Lampung. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap integrasi antara paparan isu politik di media digital dan pengembangan keterampilan berpikir kritis mahasiswa dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sahala Fransiskus Marbun dkk. (2025) Universitas Negeri Medan. Secara umum, temuan penelitian ini menegaskan bahwa media sosial telah menjadi medium utama dalam membentuk persepsi dan preferensi politik mahasiswa, namun kualitas opini yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh kemampuan mahasiswa dalam memilah dan mengevaluasi informasi. Oleh karena itu, penguatan literasi media dan berpikir kritis sangat diperlukan agar mahasiswa dapat menjadi pemilih yang rasional dan bertanggung jawab dalam demokrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Dikarsa (2021) yang menyoroti hasil dari penelitian ini bahwa aktivis mahasiswa memiliki kemampuan berpikir secara bertahap dan sistematis melalui aktivitas serta karakteristik berpikir kritis sebagai usaha dalam mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menanggapi berita politik pada media sosial instagram dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Sebagai pembanding, penelitian oleh Ulfa dkk. (2021) menemukan bahwa mengikuti isu politik dapat menambah wawasan, membuka cakrawala pemikiran, serta melatih mahasiswa untuk lebih kritis dan bijak dalam mengambil keputusan, namun juga dapat menimbulkan kejenuhan dan risiko terprovokasi oleh framing media. Sementara itu, riset oleh Wulandari & Dayati (2021) menegaskan adanya korelasi kuat antara *civic knowledge* dan partisipasi politik mahasiswa, namun belum secara spesifik menelaah peran konten isu politik dalam membentuk critical thinking.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti saat penelitian pendahuluan ditemukan bahwa sebagian mahasiswa aktif mengikuti isu-isu seperti pemilu serentak, konflik antar lembaga negara, hingga wacana perubahan konstitusi maupun kebijakan-kebijakan publik dalam pemerintahan melalui platform media massa atau media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Namun, kemampuan dalam menanggapi isu-isu tersebut masih beragam ada yang mampu mengaitkan isu dengan teori *civic knowledge* namun banyak pula yang terjebak dalam informasi yang bersifat provokatif tanpa mampu mengevaluasinya secara mendalam. Keunikan dari fenomena ini terletak pada kontras antara intensitas konsumsi informasi politik dengan rendahnya kemampuan reflektif dan analitis mahasiswa terhadap isu yang dikaji dalam konteks akademik. Hal ini menunjukkan adanya celah antara eksposur terhadap isu politik nasional dengan hasil pemahaman kritis dalam *civic knowledge*.

Secara umum, penguasaan *civic knowledge* bermanfaat luas karena dapat meningkatkan kesadaran politik, hukum, pemahaman hak dan kewajiban, serta partisipasi aktif mahasiswa dalam proses demokrasi dan pembangunan bangsa. Kemampuan *civic knowledge* dapat membantu berpikir mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen pasif informasi, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil sikap yang rasional terhadap isu-isu politik nasional yang mereka hadapi sehari-hari.

Pengaruh isu politik terhadap *civic knowledge* sangat penting diangkat karena secara spesifik berkontribusi pada pengembangan kompetensi utama dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengaitkan isu politik aktual dengan penguatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, sehingga tidak hanya menambah pengetahuan teoritis, tetapi juga meningkatkan keterampilan analisis dan evaluasi terhadap fenomena politik nyata. Secara spesifik, penguatan variabel ini bermanfaat dalam membentuk *civic knowledge* yang komprehensif, yang meliputi pemahaman hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, serta kemampuan

berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang “pengaruh isu politik terhadap kemampuan *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat diteliti, antara lain:

1. Mahasiswa PPKn Universitas Lampung semakin sering terpapar isu politik melalui media sosial, berita online, maupun diskusi publik, namun belum jelas sejauh mana paparan tersebut berpengaruh terhadap *civic knowledge*.
2. Isu politik dapat memberikan informasi dan wawasan baru, tetapi belum diketahui apakah hal tersebut benar-benar meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami *civic knowledge* secara komprehensif.
3. *Civic knowledge* merupakan aspek penting dalam studi Pendidikan Kewarganegaraan, namun belum terdapat gambaran empiris mengenai bagaimana isu politik memengaruhi *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai isu politik yang diakses mahasiswa PPKn Universitas dengan dibatasi pada “Pengaruh Isu Politik Terhadap *Civic Knowledge* Mahasiswa PPKn Universitas Lampung”.

Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini tidak membahas aspek partisipasi politik, sikap politik, maupun pengaruh media di luar lingkup akses informasi mahasiswa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh isu politik terhadap *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat paparan mahasiswa PPKn Universitas Lampung terhadap isu politik.
2. Untuk mendeskripsikan kemampuan tingkat *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung.
3. Untuk mendeskripsikan isu politik terhadap kemampuan *civic knowledge* Mahasiswa PPKn Universitas Lampung?

1.6 Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam memahami hubungan antara paparan isu politik dengan kemampuan *civic knowledge*. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai peran media digital dalam proses pembentukan pola pikir kritis generasi muda terhadap isu-isu politik nasional.

B. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengkaji hubungan antara isu politik dan kemampuan *civic knowledge* pada mahasiswa.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa, penelitian ini memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemampuan dalam *civic knowledge* terhadap isu politik yang mereka konsumsi melalui media sosial.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini mencakup:

A. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini berada dalam ranah ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya pada kajian *civic education* yang berfokus pada pembentukan *civic knowledge*, literasi politik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa sebagai warga negara

B. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

C. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian adalah Pengaruh Isu Politik Terhadap *Civic knowledge* Mahasiswa PPKn Universitas Lampung.

D. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat pada penelitian ini adalah Progam Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Lampung.

E. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian pendahuluan ini dilakukan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung pada tanggal 26 Mei 2025 dengan nomor surat 5196/UN26.13/PN.01.00/2025.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

A. Tinjauan Umum Tentang Isu Politik

1. Pengertian Isu Politik

Pengertian Isu adalah adalah fakta, nilai, atau pedoman diskusi. Dari makna isu ini mengarah pada masalah organisasi, lembaga, kelompok yang membutuhkan penanganan. Isu mengacu kepada adanya adanya suatu bibit permasalahan yang kemudian menyebabkan timbulnya perdebatan. Isu merupakan perbedaan pendapat yang diperdebatkan, masalah fakta, evaluasi, atau kebijakan yang penting bagi pihak-pihak yang berhubungan.

Isu merupakan sebuah konsekuensi dari tindakan yang diusulkan seseorang atau pihak lain yang dapat membawa dampak dalam negosiasi pribadi dan penyesuaian, sipil dan criminal litigasi, atau hal yang dapat menjadi sebuah masalah dari kebijakan public melalui legislativ aturan tindakan. Menurut (Regester & Laarkin, 2003) , definisi sederhana lainnya isu adalah kesenjangan antara praktik disesuaikan dengan keinginan para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, masalah yang muncul di permukaan mendatang. Isu bisa meliputi masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan atau nilai yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Munculnya sebuah isu dapat disebabkan oleh :

- 1) Ketidakpuasan sekelompok masyarakat.
- 2) Terjadinya peristiwa dramatis.

- 3) Perubahan sosial.
- 4) Kurang optimalnya kekuatan pemimpin.

Secara normatif politik merupakan sebuah bentuk usaha untuk mewujudkan serta mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik, di dalam polity manusia akan hidup damai serta bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi (Aristoteles & Plato). Budiardjo menyatakan bahwa politik merupakan berbagai kegiatan dalam sebuah sistem politik (atau negara) yang terkait proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem serta melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Decision making atau pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sebuah sistem politik berkenaan dengan seleksi antara beberapa alternatif serta skala prioritas dari berbagai tujuan yang telah ditentukan.

Budiardjo (2008) juga mengemukakan bahwa dalam melaksanakan tujuan-tujuan politik maka perlu ditentukan public policies atau kebijaksanaan umum yang berkenaan dengan pengaturan serta pembagian (*distribution & allocation*) terhadap sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan tentunya diperlukan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), kedua aspek ini dapat membantu pihak yang melaksanakan atau menerapkan politik (misalnya pemerintah) untuk membina kerjasama ataupun hubungan baik maupun untuk menyelesaikan konflik yang sekiranya timbul dalam proses politik. Dimana cara yang diggunakannya dapat bersifat menyakinkan (*persuasion*) atau paksaan (*coertion*). Tanpa unsur paksaan kebijakan dapat diibaratkan sebagai perumusan keinginan atau statement of intent belaka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik selalu berkenaan dan menyangkut tujuan-tujuan dari masyarakat serta kegiatan berbagai kelompok masyarakat seperti kegiatan individu hingga partai politik..

Isu mengenai politik masih menjadi topik yang diminati untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan dalam banyak kesempatan. Politik menjadi topik yang selalu menarik karena fleksibilitasnya yang mampu mengimbangi perubahan zaman dan cakupannya tentang segala aspek yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti perekonomian, tata kelola negara hingga penyelenggaraan negara. Joyce Mitchell dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy* sebagaimana dikutip dalam (Budiardjo, 2003) mendefinisikan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.

Dalam realitasnya, tidak semua isu menjadi sebuah agenda, karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam praktik politik, ternyata tidak semua isu yang sedang atau pernah berkembang di tengah-tengah masyarakat secara otomatis langsung menjadi kebijakan publik. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang aneh, karena kondisi ini dapat terjadi pada sistem politik manapun. Apakah di negara maju atau sedang berkembang. Dalam kasus tertentu suatu isu dengan mudah menggelinding, dan kemudian memperoleh respon dan kemudian, menjadi agenda kebijakan pemerintah (*public policy agenda*) untuk dibicarakan dan diambil langkah-langkah konkrit terhadap permasalahan tersebut. Namun demikian, menurut Solichin (1997) terdapat sejumlah isu tertentu, meskipun amat mendasar, tetapi tidak mampu melewati rambu-rambu birokrasi dan saluran-saluran politik para pembuat kebijakan. Isu tertentu hanya bergulir secara terbatas pada infrastruktur politik.

2. Literasi Politik

Literasi berasal dari bahasa Inggris *literacy*. Secara etimologis, kata *literacy* berakar dari bahasa Latin *littera* yang berarti huruf atau *letter*. *Literacy* kerap dimaknai sebagai kemampuan melek huruf. Karena huruf

identik dengan aksara, istilah keberaksaraan kemudian digunakan sebagai padanan yang lebih halus dari istilah melek huruf.

Secara umum, literasi dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam menerima, mengolah, serta memahami informasi melalui aktivitas membaca dan menulis. Dengan demikian, literasi berkaitan erat dengan keterampilan berbahasa, baik lisan maupun tulisan, yang menuntut kemampuan kognitif, pemahaman terhadap berbagai jenis teks (genre), serta pengetahuan budaya yang melatarbelakanginya.

Essays on Citizenship, Bernard Crick menjelaskan bahwa literasi politik merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikembangkan secara bersamaan, karena masing-masing unsur saling memengaruhi dan melengkapi. Menurutnya, fondasi literasi politik terletak pada pemahaman praktis terhadap konsep-konsep yang bersumber dari kehidupan nyata serta bahasa yang digunakan sehari-hari. Dengan demikian, literasi politik tidak hanya sebatas penguasaan informasi atau teori politik, tetapi juga mencakup kemampuan menjadikan warga negara berperan secara efektif dalam kehidupan publik serta mendorong keterlibatan aktif mereka, baik melalui jalur formal maupun partisipasi sukarela.

Bagi mahasiswa, literasi politik tidak hanya berarti memahami atau menyadari isu-isu politik, tetapi juga mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap politik yang mendorong keterlibatan nyata. Dengan demikian, mereka tidak sekadar “melek” politik, melainkan turut berpartisipasi aktif dalam menghadapi dan mengawal perubahan politik yang terus berkembang secara dinamis.

a. Aspek Literasi Politik

1) Pengetahuan Politik

Menurut pandangan Ridley dalam *Political Education* karya Brownhill dan Smart (1989), pengetahuan politik merupakan kekuatan yang mampu mendorong terwujudnya demokratisasi dalam masyarakat. Namun, model pendidikan politik yang bersifat tradisional dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan politik seharusnya diarahkan pada tujuan yang lebih praktis dan menekankan pada pendekatan berbasis peran. Dengan orientasi tersebut, pendidikan politik diharapkan dapat memberdayakan kelompok yang kurang beruntung agar memiliki kesempatan dan posisi yang lebih baik dalam kehidupan sosial dan politik.

Terdapat beberapa bentuk pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh individu, yang secara politis dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang memiliki kesadaran dan pemahaman politik yang baik, di antaranya sebagai berikut:

1. Informasi mendasar tentang sejumlah isu; siapa yang memegang kekuatan, dari mana uang tersebut datang, bagaimana sebuah institusi berjalan,
2. Bagaimana untuk menjadi terlibat secara aktif menggunakan pengetahuan dan memahami kealamian isu,
3. Bagaimana untuk memprediksi jalan yang paling efektif atas penyelesaian isu,
4. Bagaimana untuk mengenali seberapa baik objektivitas kebijakan telah diraih dan isu-isu yang ada sudah beres,
5. Bagaimana untuk memahami pandangan orang lain dan justifikasi mereka untuk aksi mereka

b. Keterampilan Politik

Keterampilan politik merupakan kemampuan individu untuk memahami orang lain secara tepat, khususnya dalam lingkungan kerja, serta memanfaatkan pemahaman tersebut guna mendukung dan mencapai tujuan pribadi maupun organisasi. Individu yang memiliki keterampilan politik yang baik umumnya menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Mereka mampu menempatkan diri pada posisi orang lain serta melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda.
- 2) Mereka dapat membaca situasi dengan baik dan menentukan respons yang paling tepat, serta menyesuaikan perilaku sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- 3) Mereka membangun dan memelihara jaringan relasi yang luas sehingga dikenal oleh banyak pihak.
- 4) Mereka relatif mudah memperoleh dukungan dan kerja sama dari orang lain.
- 5) Mereka mampu menciptakan rasa nyaman bagi orang di sekitarnya. Individu yang memiliki keterampilan politik yang baik dapat memanfaatkannya untuk kepentingan organisasi, seperti menjalin kolaborasi antar kelompok. Namun, apabila digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau politik individu, keterampilan tersebut justru berpotensi merugikan organisasi.

c. Sikap Politik

Sikap politik adalah keterkaitan antara keyakinan yang telah tertanam dalam diri seseorang dengan kecenderungannya dalam merespons suatu objek atau situasi politik secara tertentu. Sikap ini terbentuk setelah individu mengamati, memahami, dan menghayati berbagai

aktivitas politik, yang kemudian memengaruhinya dalam menentukan pilihan atau tindakan. Menurut Sastroatmodjo (1995), sikap politik merupakan predisposisi atau kecenderungan internal untuk bertindak dalam ranah politik, yang pada dasarnya masih berada pada tingkat batiniah sebelum diwujudkan dalam perilaku nyata.

3. Dimensi Politik

1. Politik sebagai Studi Kelembagaan (Institusi)

Politik sebagai studi kelembagaan objeknya adalah negara. Negara di sini dilihat sebagai suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat. Negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkannya. Sebagai lembaga, negara memiliki unsur wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan. Unsur-unsur ini menjadi modal dasar yang harus dipertahankan untuk eksisnya suatu negara, yakni melindungi wilayah dan penduduknya, memelihara pemerintahannya, serta menjaga kedaulatannya. Untuk menjaga dan melindungi wilayah, penduduk dan kedaulatan suatu negara, pemerintah (negara) memiliki sifat memaksa, monopoli, serta sifat mencakup semua. Sifat memaksa diartikan bahwa untuk menghindari terjadinya anarki atau kekacauan, negara memiliki kekuasaan untuk memaksa agar undang-undang ditaati. Jika tidak, pelanggar undang-undang akan dikenakan sanksi. Sifat monopoli diartikan bahwa negara memiliki tujuan. Oleh karena itu, terhadap setiap perilaku masyarakat yang bertentangan dengan tujuan dan cita-cita negara, negara memiliki kekuasaan untuk melarang. Sementara itu, yang dimaksudkan sifat mencakup semua adalah perlakuan sebuah undang-undang atau peraturan yang mencakup semua warga negara tanpa kecuali.

2. Politik Sebagai studi Kekuasaan (Power)

Pemahaman politik sebagai studi kekuasaan telah mendapat kecaman dengan menempatkan politik dalam area yang sangat sempit karena ilmu politik tidak hanya mempelajari kekuasaan semata-mata, melainkan juga mempelajari kerja sama antara individu atau pelaku-pelaku politik. Ilmu politik berusaha menciptakan harmonisasi dalam menciptakan keteraturan dalam masyarakat tanpa paksaan atau penggunaan kekuasaan. Lagi pula politik tidak hanya menyelidiki proses politik, tetapi juga ide-ide politik serta hakikat politik sebagai ilmu yang bisa menciptakan konsep-konsep atau model-model pemerintahan yang baik. Para penganut khawatir bahwa ilmu politik pada akhirnya hanya akan melahirkan sejumlah teori tentang golongan yang berkuasa (*ruling class*) dan teori tentang elite politik, padahal yang tidak kalah penting adalah golongan yang diperintah yang lebih besar jumlahnya dari golongan yang memerintah.

Meski mendapat kecaman, namun harus diakui bahwa dalam membahas studi politik, masalah kekuasaan tidak bisa diabaikan. Menurut Lord Russel, "kekuasaan sama dengan energi yang bisa menggerakkan kekuatan lainnya. Russel lebih jauh melihat bahwa kekuasaan sangat penting dilihat dari dua hal, yakni selain sebagai gejala sosial juga sebagai naluri individu. Sebab itu, keinginan untuk berkuasa selalu ada dan menjadi hasrat yang utama bagi setiap manusia. Jadi kekuasaan sebagai fenomena sosial bukan hanya menjadi objek studi ilmu politik, tetapi merupakan objek yang sangat fundamental bagi setiap ilmu sosial lainnya. Jadi, politik sebagai studi kekuasaan di samping mempelajari kelembagaan negara juga mempelajari lembaga-lembaga lain yang bisa memiliki kekuasaan dalam penentuan kebijakan negara. Misalnya partai politik dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, seperti *Non-Government Organization* (NGO), kelompok mahasiswa, dan

kelompok-kelompok keagamaan

3. Politik Sebagai Studi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan harus didahului pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus mencerminkan mayoritas yang mendukung keputusan itu, atau dengan kata lain keputusan yang diambil harus mencerminkan keinginan orang banyak dan bukan keinginan diri sendiri. Esensi pengambilan keputusan dalam politik adalah pengembalian kekuasaan yang mencerminkan representasi publik yang diwakili, sebagaimana dikemukakan oleh Benyamin Disraeli bahwa *"politics are the possession and distribution of power."* (Cummings, 1985). Sebuah pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang mungkin bisa saja terjadi harus mendapat prioritas daripada kepentingan yang lain. Penentuan prioritas ini harus menjadi suatu kebijakan yang mengikat untuk semua pihak, bukan saja para penyelenggara negara, tetapi juga para warga yang menjadi objek dan subjek kebijakan itu. Pengambilan keputusan untuk menetapkan prioritas dipandang sebagai suatu kebijakan publik (Ranney, 1990).

Kebijakan publik harus diimplementasikan melalui distribusi alokasi sumber daya yang memiliki nilai (*values*). Nilai bisa saja dalam bentuk ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur, sementara nilai yang bernilai sosial dalam bentuk kekuasaan (*authority*) karena memiliki nilai prestise sosial dalam memenuhi aktualisasi diri (*self esteem*) seseorang. Dalam pembagian distribusi atau alokasi sumber daya dalam politik sering menimbulkan konflik. *"Complict that is, some form of struggle among people trying to achieve different goals and satisfy opposing interests"*. Konflik adalah bentuk perjuangan di antara orang-orang yang mencoba untuk mencapai tujuan yang berbeda satu sama lain guna memuaskan kepentingannya melalui nilai-nilai yang diperebutkan itu.

B. Tinjauan Umum Tentang *Civic knowledge*

1. Pengertian *Civic knowledge*

Civic knowledge atau yang disebut pengetahuan kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan kandungan atau hal apa saja yang seharusnya diketahui oleh seorang warga negara. Dalam *civic knowledge* juga berisikan hal-hal yang harus diketahui serta dipahami secara layak oleh warga negara.

Menurut (Branson dalam Winarno 2019:107) menyatakan bahwa, “komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*)”. Tiga komponen utama tersebut jika dikaitkan dengan model yang disampaikan oleh Benjamin S.. Bloom dalam Yulaewati dalam Winarno (2019:107) maka akan terlihat kesamaannya dengan tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Menurut (Winarno 2019:107) menjelaskan: Keterkaitan antara tiga komponen tersebut dengan domain yang dijelaskan oleh Benjamin S.. Bloom bahwa Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dapat dipadukan dengan ranah kognitif, keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dapat dipadukan dengan ranah psikomotor, sedangkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dapat dipadukan dengan ranah afektif. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mengoptimalkan pemahaman nilai demokrasi dan pluralisme sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Adha, 2015)

Civic knowledge atau yang disebut pengetahuan kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan kandungan atau hal apa saja yang seharusnya diketahui oleh seorang warga negara. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan yang meliputi

pemahaman nilai-nilai sosial dan politik serta tanggung jawab sebagai warga negara (Nurmalisa, Mentari, & Rohman, 2020). *Dalam civic knowledge* juga berisikan hal-hal yang harus diketahui serta dipahami secara layak oleh warga negara. Seperti yang disebutkan oleh (Winarno 2019:08) bahwa “*Civic-related knowledge, both historical and contemporary, such as understanding the structure and mechanics of constitutional government, and knowing who the local political actors are and how democratic institutions function*”.

Branson dalam Hakiki (2019) berdasarkan *Nasional Standart and Civic Framework for the 1998 Nasional Assessment of Education Progress* (NAEP), komponen pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan dalam bentuk pertanyaan penting yaitu:

1. Bagaimana kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintah?
Membantu warga negara membuat penilaian berdasarkan informasi tentang sifat kehidupan sipil, politik, dan pemerintahan, dan mengapa politik dan pemerintah diperlukan, tujuan pemerintah; karakteristik penting dari pemerintah yang terbatas dan tidak terbatas, sifat dan tujuan dari konstitusi, dan cara-cara alternatif untuk mengatur pemerintahan konstitusional.
2. Apa sajakah pondasi-pondasi sistem politik?
Memberikan pemahaman tentang fondasi historis, filosofis, dan ekonomi dari sistem politik di suatu negara, karakteristik khas masyarakat dan budaya politik serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi di suatu negara seperti, hak dan tanggungjawab individu, supermasi hukum, keadilan, kesetaraan, keragaman, kebenaran, patriotisme, dan pemisahan kekuasaan.
3. Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi
mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi?

Membantu warga negara memahami dan mengevaluasi kinerja pemerintah yang telah mereka laksanakan, memahami pembenaran untuk sistem kekuasaan terbatas, tersebar, dan gambarnya lebih mampu membuat pemerintah bertanggung jawab baik di tingkat daerah hingga nasional dan untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi.

4. Apa peran warga negara dalam demokrasi?

Warga negara harus memahami bahwa melalui keterlibatan mereka dalam kehidupan politik dan dalam masyarakat, mereka dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan di lingkungan, komunitas, dan bangsa mereka. Jika mereka ingin suara mereka didengar, mereka harus ikut berperan aktif dalam proses politik.

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, secara umum dapat menjelaskan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) merupakan pemahaman dasar yang harus dimiliki oleh warga negara yang berkaitan dengan kewarganegaraan, dimana hal tersebut meliputi struktur kewarganegaraan, kewarganegaraan, *civic society*, dan demokrasi.

2. **Komponen Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)**

Menurut Margaret (1999:12-15) komponen pengetahuan kewarganegaraan diwujudkan kedalam lima bentuk pertanyaan yang terus menerus diajukan kepada siswa agar menjadi warga Negara yang bisa berfikir. Bentuk pertanyaan tersebut, sebagai berikut: apa kehidupan kewarganegaraan, politik dan pemerintahannya, apa dasar sistem politik Indonesia, bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh UUD 1945 menegajawantahkan tujuan, nilai dan prinsip, bagaimana hubungan Indonesia dengan Negara lain dan posisinya mengenai masalah nasional, dan apa peran warga dalam demokrasi Indonesia.

Kegunaan dari pertanyaan-pertanyaan diatas adalah untuk menunjukkan

bahwa proses perenungannya tidak pernah berakhir, tempat pemasaran ide-ide, suatu pencarian baru dan sebagai cara terbaik untuk merealisasikan cita-cita demokrasi. Setiap orang yang memiliki kesempatan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai pemerintahan dan masyarakat sipil (*Civil Society*) penting untuk dilakukan agar dapat terus menantang orang-orang yang mau berfikir. Perenungan pertanyaan tersebut hendaknya mengembangkan pemahaman yang lebih besar akan hakikat pentingnya *Civil Society* atau jaringan kompleks, asosiasi-asosiasi politik, sosial dan ekonomi yang dibentuk dengan bebas serta sukarela yang merupakan komponen esensial dan demokrasi konstitusional.

Menurut (Adnan, 2005:72-73), komponen pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan dalam sistem demokrasi, sebagai berikut: konsep sebagai substansi demokrasi, kelangsungan ketegangan yang memunculkan masalah-masalah publik, konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintahan demokratis, fungsi-fungsi lembaga demokratis, praktik-praktik kewarganegaraan demokratis dan perananan warga Negara, konteks demokrasi: budaya, sosial, politik dan ekonomi, dan sejarah demokrasi di negara tertentu dan dunia. Ada juga komponen *Civic Knowledge* yang mencakup bidang politik, hukum dan moral. Secara lebih rinci pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik.

Berdasarkan penuturan para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap

struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan dan bernegara. *Civic Knowledge* meliputi kecerdasan, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan oleh warga Negara.

3. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*)

Struktur keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan terdiri atas tiga kompetensi dasar yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Ketiga kompetensi tersebut memiliki dimensinya masing-masing. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*) mencakup politik, hukum dan moral, dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; sedangkan dimensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*) meliputi percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral.

Depdiknas dalam Hakiki (2019) “Dimensi pengetahuan kewarganegaraan mencakup bidang politik, hukum, dan moral”. Lebih rincinya akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Politik
 - a. Manusia sebagai zoon politicon (makhluk sosial).
 - b. Proses terbentuknya masyarakat.
 - c. Proses terbentuknya bangsa.
 - d. Asal usul negara.
 - e. Unsur-unsur, tujuan negara, dan bentuk-bentuk negara.
 - f. Kewarganegaraan
 - g. Lembaga politik
 - h. Model-model sistem politik

- i. Lembaga-lembaga negara
 - j. Demokrasi Pancasila
 - k. Globalisasi
2. Hukum
- a. Rule of law
 - b. Konstitusi
 - c. Sistem hukum
 - d. Sumber hukum
 - e. Subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan sanksi hukum
 - f. Pembidangan hukum.
 - g. Proses hukum
 - h. Peradilan
3. Moral
- a. Pengertian nilai, norma, dan moral
 - b. Hubungan antara nilai, norma, dan moral
 - c. Sumber-sumber ajaran moral
 - d. Norma-norma dalam masyarakat
 - e. Implementasi nilai-nilai moral pancasila

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anita Fatkhiana Khofsuh tahun 2024 dengan judul Pengaruh Berita Politik Terhadap Kemampuan Bernalar Kritis Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ppkn (Studi Eksperimen di Kelas XI 4 SMAN 1 Pandeglang). Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Probability Sampling dengan bentuk Simple Random Sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berita politik terhadap kemampuan bernalar kritis peserta didik pada mata pelajaran PPKn di SMAN 1 Pandeglang khususnya di kelas XI. Dalam pengolahan datanya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kuantitatif, dengan metode penelitian eksperimen. Analisis

data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data dekriptif dan juga analisis statistik inferensial dengan uji prasyaratan data dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Pada uji normalitasnya, terdapat hasil nilai yang tidak normal pada hasil uji post test kelas kontrol dimana hasilnya ialah $0,020 < 0,05$ dapat diambil kesimpulan pula bahwa pemberian media berita politik terhadap bernalar kritis peserta didik terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dikatakan pula bahwa “ada pengaruh berita politik terhadap kemampuan bernalar kritis peserta didik pada mata pelajaran PPKn”.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian Anita Fatkhiana Khofsuh lebih menekankan pada analisis statistik, validitas, dan reliabilitas instrumen. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis reflektif dan fenomenologis terhadap perilaku dan respons mahasiswa terhadap konten politik digital. Dengan kata lain, Anita berupaya membuktikan pengaruh berita politik secara eksperimental, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti bagaimana proses berpikir kritis itu terbentuk dan dipengaruhi oleh paparan konten politik di lingkungan digital secara alami dan kontekstual. Sedangkan persamaan penelitian oleh Anita Fatkhiana Khofsuh dengan penelitian penulis adalah urgensi akademik dan sosial yang kuat, yaitu membekali generasi muda dengan literasi politik dan keterampilan berpikir kritis agar dapat berperan aktif dan cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Pemanfaatan Literasi Digital Untuk Penyelesaian Tugas Mahasiswa Ppkn Universitas Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa PPKn (sebagai data utama) dan dosen (sebagai data penunjang), observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data atau informasi. Kemudian direduksi,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan, data yang dihasilkan nantinya berbentuk penjabaran berupa kata-kata. Literasi digital. Mahasiswa cenderung menggunakan langkah-langkah sederhana dalam mencari solusi masalah, mengutip dari Google tanpa evaluasi mendalam, serta kurang kritisitas dalam memilih, mengevaluasi sumber informasi. Kurangnya pendekatan sistematis dalam evaluasi informasi menjadi temuan utama. Mayoritas mahasiswa mengandalkan copy-paste tanpa memahami teori dengan baik. Kesulitan dalam membaca dan mencari sumber informasi yang sesuai, bersama dengan kurangnya motivasi dan akses informasi, menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan literasi digital. Sebagai solusi, dianjurkan untuk memberikan motivasi, pelatihan literasi informasi, serta sumber daya online relevan kepada mahasiswa, peningkatan daya literasi informasi, pemanfaatan perpustakaan digital, dan konsultasi dengan dosen juga direkomendasikan untuk mengatasi kendala tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus masalahnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan permasalahan pedagogis tentang efektivitas metode pembelajaran terhadap pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan pada penelitian ini fokus masalahnya sosial-kognitif tentang dampak informasi politik digital. Persamaan Muhammad Ikhsan dengan penelitian penulis adalah meningkatkan kualitas berpikir analitis dan kritis untuk menghadapi tantangan pendidikan dan sosial.

3. Penelitian jurnal yang dilakukan Fauzi, dkk. dengan judul Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kesadaran Politik Mahasiswa. Penelitian ini menyoroti pentingnya pandangan mahasiswa di masa kini terkait politik, serta faktor apa yang menunjukkan pentingnya PKN dalam membentuk pandangan tersebut. Ditemukan bahwa perlu adanya pembaruan dalam mata kuliah PKN untuk menyesuaikan kerangka teoretis dengan perkembangan politik saat ini, serta partisipasi aktif mahasiswa dalam

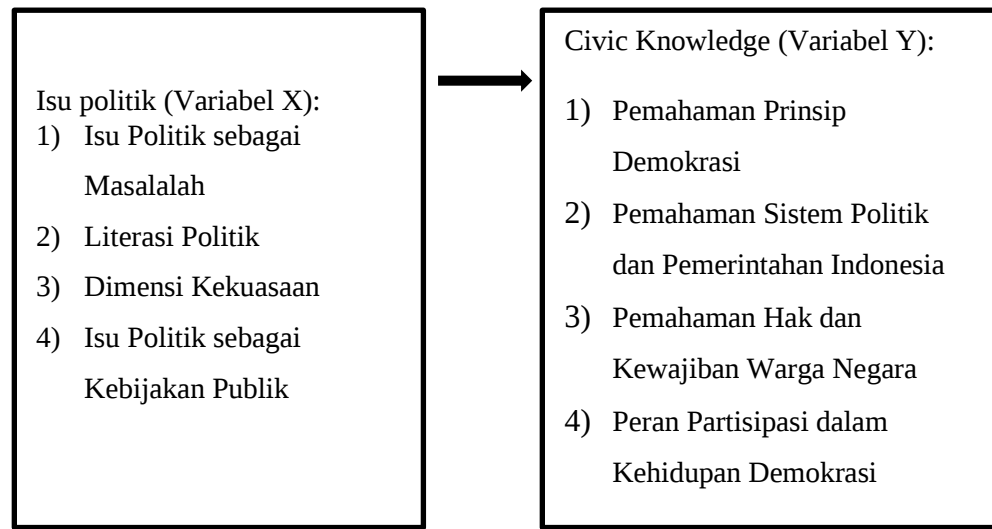
berpolitik. PKN hendaknya menyadarkan mahasiswa mengenai hak dan kewajiban dalam berpolitik, sehingga kesadaran politik dapat terbentuk secara ideal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada fokus masalahnya, penelitian yang dilakukan oleh Fauzi, dk. pendidikan Kewarganegaraan tetap memiliki peran yang besar dalam membangun Kesadaran Politik pada mahasiswa. Kesadaran Politik dapat tumbuh ketika mahasiswa tertarik dan peduli dengan materi yang berkesinambungan dalam Pendidikan Kewarganegaraan seperti ruang diskusi dan penyampaian aspirasi dengan tujuan menerapkan nilai-nilai demokrasi pada pendidikan kewarganegaraan., sedangkan pada penelitian ini fokusnya lebih pada dampak paparan konten politik secara sosial dan kognitif terhadap mahasiswa. . Sedangkan persamaan penelitian oleh Fauzi, dkk. dengan penelitian penulis adalah mengkaji mahasiswa sebagai subjek, sama-sama berada pada ranah pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), serta sama-sama meneliti pengaruh faktor tertentu terhadap aspek kewarganegaraan mahasiswa. Kedua penelitian sama-sama menekankan pentingnya mahasiswa memiliki pemahaman politik dan kewarganegaraan yang baik agar dapat berperan sebagai warga negara yang kritis, sadar, dan bertanggung jawab.

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2020:113), kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai bagian penting dari masalah penelitian. Kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan secara sistematis hubungan antar variabel dalam penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya isu politik nasional melalui media sosial yang sangat mudah diakses oleh mahasiswa. Konten tersebut hadir dalam berbagai bentuk: berita, opini, video pendek, atau komentar-komentar publik, yang tidak selalu netral, edukatif, atau berbasis data. Sering kali, konten tersebut bersifat provokatif,

mengandung hoaks, atau bersifat satu arah tanpa ruang dialog yang kritis. Konten-konten tersebut tidak selalu bersifat edukatif, melainkan sering kali bias, provokatif, dan mengandung hoaks. Hal ini menjadi tantangan bagi mahasiswa PPKn yang seharusnya memiliki bekal *civic knowledge* yang baik. Tanpa literasi digital yang memadai, mahasiswa bisa menjadi pasif, menerima informasi tanpa analisis, dan gagal mengaitkan informasi politik dengan nilai-nilai konstitusional.

Paparan yang politik yang tinggi namun tidak diimbangi kemampuan reflektif dan analitis dapat melemahkan penguasaan konsep kewarganegaraan serta partisipasi demokratis. Dalam konteks mahasiswa PPKn yang seharusnya memiliki bekal *civic knowledge* yang kuat dan mampu berpikir kritis terhadap isu-isu kebangsaan, fenomena ini menjadi tantangan. Banyak mahasiswa terpapar isu politik, tetapi tidak semuanya mampu menyaring informasi secara kritis, mengevaluasi kebenaran informasi, atau menghubungkannya dengan teori dan nilai-nilai kewarganegaraan. Perlu ditelusuri lebih lanjut bagaimana isu politik yang tersebar di media sosial berdampak terhadap mahasiswa dalam kemampuan memahami *civic knowledge*, khususnya pada ranah analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Relasi antara isu politik dan kemampuan *civic knowledge* menjadi dasar untuk mengkaji kontribusi positif maupun negatif dari konten digital terhadap pendidikan kewarganegaraan di lingkungan mahasiswa PPKn Universitas Lampung. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir dari permasalahan di atas, maka dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H_0 : Tidak terdapat pengaruh isu politik terhadap kemampuan *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung
- H_1 : Terdapat pengaruh isu politik terhadap kemampuan *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan antara konsep-konsep dari satu variabel dengan variabel lainnya secara numerik. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh isu politi terhadap *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung.

3.2 Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi dapat di definisikan sebagai seluruh objek dalam penelitian, termasuk objek dan objek yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Secara umum, populasi adalah sekelompok orang, hewan, peristiwa, atau benda yang hidup di tempat yang sama sesuai dengan hasil penelitian yang diharapkan (Amin dkk., 2023). Dalam penelitian, menentukan populasi adalah salah satu hal yang paling penting. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2023 dan 2024 yang berjumlah 190 orang.

B. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Sugiyono (2017) berpendapat bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan demikian, sampel yang diambil dalam penelitian harus benar-benar mewakili keseluruhan (representatif). Teknik

pengambilan sampel sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian karena hal ini digunakan untuk menentukan siapa saja anggota dari populasi yang hendak dijadikan sampel. Untuk itu teknik pengambilan sampel haruslah secara jelas tergambarkan dalam rencana penelitian sehingga jelas dan tidak membingungkan ketika terjun dilapangan. Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Proportional Random Sampling* (PRS) yaitu sampel acak sehingga peneliti memberikan hak yang sama kepada seluruh Mahasiswa PPKn Universitas Lampung Angkatan 2023 dan 2024 yang memperoleh kesempatan untuk menjadi sampel.

Teknik random sampling adalah metode pengambilan sampel dari suatu populasi yang dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan lapisan atau strata dalam populasi tersebut. Teknik ini memastikan bahwa sampel yang dipilih tidak ditentukan secara sengaja oleh peneliti, melainkan diambil secara acak. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% (0,1) dan total populasi sebanyak 190 Mahasiswa. Perhitungan menggunakan rumus Slovin cukup sederhana dan tidak memerlukan tabel jumlah sampel. Adapun rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = banyak sampel

N = banyak populasi

e^2 = presentase kelongaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masi bisa ditolerir (e : (0,1))

$$n = \frac{190}{1 + 190(0,1)^2}$$

$$n = \frac{190}{2,9}$$

$$n = 65,5 (65)$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 65 Mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2022 dan 2023. Sampel tersebut merupakan perhitungan sampel sementara. Berikut perhitungan jumlah sampel dengan memperhatikan strata menggunakan rumus alokasi proposional untuk menentukan sampel setiap jenjang:

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 65 Mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2022 dan 2023. Sampel tersebut merupakan perhitungan sampel sementara. Berikut perhitungan jumlah sampel dengan memperhatikan strata menggunakan rumus alokasi proposional untuk menentukan sampel setiap jenjang:

$$n = \frac{\text{Jumlah mahasiswa}}{\text{Jumlah populasi}} \text{ jumlah sampel}$$

$$\text{a. Angkatan 2023} = \frac{90}{190} 65 = 30,7 (31)$$

$$\text{b. Angkatan 2024} = \frac{100}{190} 65 = 34,2 (34)$$

Jumlah keseluruhan sampel 65

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan objek yang melekat (dimiliki) pada subjek. Objek penelitian dapat berupa orang, benda, transaksi atau peristiwa yang dikumpulkan dari subjek penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau nilai dari masing-masing subjek penelitian. Variabel dibagi menjadi 2, yaitu:

1) Variabel Bebas (*Independent variable*)

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah isu politik

2) Variabel Terikat (*Dependent variable*) Variabel terikat (Y) dalam penelitian adalah kemampuan *civic knowledge*

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional

A. Definisi Konseptual

Menurut Sarwono, pengertian konseptual adalah gagasan yang dijelaskan dengan bantuan gagasan lain karena bersifat hipotetis dan tidak dapat diamati. Adapun rincian penelitiannya adalah sebagai berikut:

a. Isu Politik

Secara konseptual isu politik adalah segala bentuk informasi, gagasan, dan peristiwa yang berkaitan dengan dinamika politik nasional, baik dalam ranah pemerintahan, kebijakan publik, maupun aktivitas politik masyarakat, yang disebarluaskan melalui media sosial, media massa, atau forum diskusi. Konten ini dapat mempengaruhi cara berpikir mahasiswa dalam memahami fenomena politik yang sedang berkembang.

b. *Civic Knowledge*

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan adalah pemahaman dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara mengenai prinsip-prinsip, struktur, serta proses bernegara. *Civic knowledge* mencakup pengetahuan tentang demokrasi, hukum, hak dan kewajiban warga negara, sistem politik, serta peran individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memiliki bekal *civic knowledge* yang memadai, warga negara diharapkan mampu mengenali hak konstitusionalnya, memahami mekanisme pengambilan keputusan politik, serta menilai secara kritis kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah. Pengetahuan kewarganegaraan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif karena menjadi fondasi bagi tumbuhnya keterampilan berpikir kritis, kesadaran hukum, dan sikap partisipatif dalam kehidupan demokrasi.

B. Definisi Operasional

Operasional merupakan definisi yang menjadikan variabel yang diteliti relevan dengan pengukuran variabel tersebut. Uraian kegiatan yang disebutkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Isu Politik

- 1) Isu Politik sebagai Masalah
- 2) Dimensi Kelembagaan
- 3) Dimensi Kekuasaan
- 4) Isu Politik sebagai Kebijakan Publik

b. *Civic Knowledge*

- 1) Pemahaman Prinsip Demokrasi
- 2) Pemahaman Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia
- 3) Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara
- 4) **Peran** dan Partisipasi Mahasiswa dalam Kehidupan Demokrasi

3.5 Teknik Pengumpulan Data

A. Teknik Pokok

1. Angket

Angket adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengukur suatu variabel penelitian (Ardiansyah dkk., 2023). Kuesioner atau angket digunakan untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya, observasi terstruktur adalah variabel-variabel yang telah direncanakan dan direncanakan sebelumnya, survei digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu faktor tertentu terhadap variabel lain. Penulis menggunakan teknis pengumpulan ini agar bisa secara langsung mendapatkan data dari responden. Bentuk angket yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah angket tertutup, di mana peserta mengisi pertanyaan sesuai dengan kolom yang disediakan penulis. Penulis memilih

teknik angket untuk memudahkan pengumpulan data dari responden. Sasaran angket ini adalah mahasiswa PPKn Universitas Lampung tahun 2023. Skala angket yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert. Sugiyono (2012:136) menyatakan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pikiran dan perasaan seseorang atau sekelompok orang mengenai permasalahan sosial. Skala likert merupakan skala yang dimaksudkan untuk mengukur sikap atau pendapat seseorang yang memberikan penilaian positif atau negative terhadap item yang diukur. Instrumen survei dengan skala likert dapat dibuat dalam format daftar atau pilihan ganda. Saat menggunakan ukuran ini, peneliti menggunakan bentuk yang di modifikasi. Untuk membuat suatu bilangan, pada timbangan diberikan angka-angka sebagai simbol untuk melakukan perhitungan. Biasanya nomor kodenya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk alternatif jawaban diharapkan diberi nilai atau skor tiga.
- 2) Untuk alternatif jawaban kurang diharapkan diberi nilai atau skor dua.
- 3) Untuk alternatif jawaban tidak diharapkan diberi nilai atau skor satu.

2. Tes

Tes merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh siswa untuk mengukur aspek perilaku siswa (Arifin, 2016). Tes yang diberikan adalah tes tertutup yang telah disediakan jawaban berupa benar atau salah. Apabila mahasiswa menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan skor (1) dan apabila mahasiswa menjawab pertanyaan dengan salah akan mendapatkan skor (0). Tes diberikan kepada mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2023-2024 untuk melihat tingkat pemahaman mahasiswa tersebut. Tes ini digunakan untuk melihat sejauh mana isu politik berpengaruh terhadap *civic knowledge*

mahasiswa, baik dari segi kemampuan mengenali konsep dasar maupun kemampuan analisis terhadap fenomena politik di Indonesia. Dengan demikian, hasil tes ini menjadi dasar dalam mengukur variabel dependen (Y) yaitu *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung.

B. Teknik Penunjang

1. Wawancara

Seperti yang dikemukakan oleh Esterberg, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar pikiran dan pendapat melalui tanya jawab, dengan tujuan untuk kembali pada suatu kesimpulan atau penjelasan tentang suatu topik tertentu. Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian melalui tanya jawab dan mencakup percakapan pribadi antara orang yang diwawancarai dan narasumber. Dapat dijelaskan bahwa wawancara adalah suatu teknik yang dikembangkan untuk memperoleh informasi dari sumber dan dilakukan oleh peneliti dan narasumber. Wawancara ini digunakan untuk mendukung penelitian guna mengumpulkan data tambahan. Penulis melakukan wawancara langsung, mengajukan pertanyaan dan menyiapkan survei. Perlunya alat yang dapat membantu peneliti menemukan informasi yang ingin diketahuinya. wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung oleh mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2023 dan 2024 untuk memperoleh informasi tambahan mengenai isu politik terhadap *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung.

3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

A. Uji Validitas

Uji validasi adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja suatu alat pengujian atau untuk mengukur kegunaan data. Seringkali digunakan untuk mengukur seberapa berguna suatu kuisioner dalam memperoleh informasi, terutama untuk pertanyaan yang diajukan dalam

survei. Pada statistik, selain menguji apakah data berdistribusi normal, kita juga perlu mengevaluasi apakah data tersebut dapat diandalkan dan stabil ketika dilakukan pengukuran berulang, uji validitas ini biasanya menggunakan SPSS (Janna, 2021).

Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas instrumen angket menggunakan teknik korelasi pearson product moment dengan kriteria diterima dna tidaknya suatu data valid atau tidak dalam penelitian berdasarkan nilai korelasi. Adapun rumus untuk menguji validitas tes dengan teknik korelasi pearson product moment, yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{(N\sum x^2 - (\sum x)^2)(N\sum y^2 - (\sum y)^2)\}}}$$

Keterangan

r_{xy}	= Koefesien korelasi
N	= Banyaknya jumlah/subyek
$\sum xy$	= Total perkalian skor x dan y
$\sum x$	= Jumlah skor variabel x
$\sum y$	= Jumlah skor variabel y
$(\sum x)^2$	= Total kuadrat skor variabel x
$(\sum y)^2$	= Total kuadrat skor variabel y

Setelah mengetahui hasil dari rumus pearson product moment, kemudian peneliti juga melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua sisi dengan tarif signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka instrumen dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji validitas dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan

Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 27.

Untuk instrumen berupa tes dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan menggunakan validitas isi, validitas empiris dan analisis butir soal.

1. Validitas Isi

Validitas isi dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh instrumen mencerminkan tujuan yang telah dirumuskan. Sebuah instrumen tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus yang sejajar dengan apa yang diberikan. Untuk mengetahui validitas isi instrumen dalam penelitian ini disusun kisi-kisi tes untuk mengetahui pengaruh literasi baca terhadap *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung.

2. Validitas Empiris

Validitas empiris diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi. Validitas empiris sama dengan validitas kriteria yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria. Validitas empiris ini dilakukan dengan menganalisis hasil tes mahasiswa PPKn sebagai subjek uji coba yaitu mahasiswa PPKn di luar responden (mahasiswa PPKn angkatan 2022). Uji coba dilakukan di Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2022 dengan jumlah uji coba sebanyak 10 mahasiswa.

3. Analisis Butir Soal

Analisis butir soal atau analisis item adalah pengkajian pertanyaan pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaannya yang memiliki kualitas memadai. Ada dua jenis analisis butir soal, yaitu analisis tingkat kesukaran soal dan analisis daya pembeda di samping validitas. Kedua jenis analisis diuraikan sebagai berikut:

a. Tingkat Kesukaran

Menurut Bagiyono (2017) bahwa tingkat kesukaran butir soal

diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan responden dalam menjawab soal tersebut. Untuk memperoleh kualitas soal yang baik disamping memenuhi validitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk sangat mudah, mudah, sedang, sukar dan sangat sukar secara proporsional. Beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kategori sangat mudah, mudah, sedang, sukar dan sangat sukar. Perhitungan tingkat kesukaran ini dapat dihitung melalui alat bantu SPSS versi 22. menggunakan alat bantu SPSS versi 22. Langkah-langkah menghitung tingkat kesukaran butir soal sebagai berikut: (1) *Analyze*; (2) *Descriptive Statistics* (3) *Frequencies* >> pindahkan semua data soal dari kolom kiri ke kanan >> klik bagian statistics >> ceklist central tendency bagian *Mean* >> *continue* >> OK.

Tabel 4. Klasifikasi Tingkat Kesukaran Butir Soal Tes

No	Tingkat Kesukaran	Kriteria
1.	Soal dengan P 0,00 - 0,15	Sangat Sukar
2.	Soal dengan P 0,16 - 0,30	Sukar
3.	Soal dengan P 0,31 - 0,70	Sedang
4.	Soal dengan P 0,71 - 0,85	Mudah
5.	Soal dengan P 0,86 - 1,00	Sangat Mudah

Sumber: Sudjiino, A (2016)

b. Daya Pembeda

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada didalam kelompok itu. Menurut Bagiyono (2017) salah satu tujuan analisis daya pembeda butir soal adalah untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal membedakan antara mahasiswa yang berkemampuan tinggi dengan mahasiswa yang berkemampuan rendah. Perhitungan daya beda soal pada penelitian ini

menggunakan alat bantuan SPSS versi 22 dengan langkah-langkah menghitung daya beda butir soal sebagai berikut: (1) Masukkan seluruh data dan skor total; (2) *Analyze >> Correlate >> Bivariate*; (3) Masukkan seluruh item ke dalam kotak Variabels; (4) *Klik Pearson >> OK*.

Tabel 1 Klasifikasi Daya Pembeda Butir Tes

N0.	Daya Kesukaran	Kriteria
1.	Soal dengan DB 0,40 sampai 1,00	Soal diterima baik sekali
2.	Soal dengan DB 0,30 sampai 0,39	Soal diterima
3.	Soal dengan DB 0,20 sampai 0,29	Soal direvisi
4.	Soal dengan DB 0,19 sampai 0,00	Soal dibuang

B. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2021) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas instrumen ialah syarat pengujian validitas instrumen, maka dari itu instrumen yang valid umumnya pasti reliabel namun pengujian reliabilitas instrumen tetap perlu dilakukan. Sugiyono menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas instrumen ialah syarat pengujian validitas instrumen, maka dari itu instrumen yang valid umumnya pasti reliabel namun pengujian reliabilitas instrumen tetap perlu dilakukan. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Menurut Wibowo cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* melalui bantuan SPSS 27. Kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut

ini:

Tabel 2. Indeks Koefisien Reliabilitas

Nilai Inteval	Kriteria
<0,20	Sangat Rendah
0,20 - 0,40	Rendah
0,40 – 0,60	Cukup
0,60 – 0,80	Tinggi
0,80 – 1,00	Sangat Tinggi

Sumber: (Wibowo 2012)

Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai r_{tabel} menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan $df = N - k$, $df = N - 2$, N adalah banyaknya sampel dan k adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu:

- Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) > r_{tabeldf}$ maka butir pertanyaan atau pertanyaan tersebut reliabel.
- Jika $r_{hitung} (r_{alpha}) \leq r_{tabeldf}$ maka butir pertanyaan atau pertanyaan tersebut tidak ada reliabel. (Wibowo, 2012)

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikutsertakan.
- Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*.
- Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan r_{tabel} .

3.7 Instrumen Penelitian

Sugiyono (2014) menjelaskan instrumen penilaian merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data yang bertujuan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diteliti, maka tujuan dari penggunaan instrumen penelitian yakni guna mencari informasi dan data yang lengkap terkait permasalahan, baik fenomena alam maupun sosial. Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

A. Angket

Angket atau disebut juga dengan kuesioner berisi daftar pertanyaan yang secara tertulis mencakup item-item pertanyaan terkait penelitian dan akan dijawab oleh responden penelitian yakni mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan 2023 yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Angket yang akan digunakan sifatnya tertutup, yakni item-item pertanyaan telah disertai alternatif jawaban yang perlu dipilih oleh responden tersebut.

Penelitian ini menggunakan angket yang sifatnya tertutup dengan model skala likert dalam bentuk ceklis dan telah ditentukan bahwa responden akan menjawab pertanyaan dengan tiga alternatif yang telah disediakan, yaitu (a), (b) dan (c) yang mana setiap jawaban memiliki bobot skor yang bervariasi. Variasi skor dari tiap-tiap jawaban memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Untuk alternatif jawaban tidak setuju diberi nilai atau skor satu
- 2) Untuk alternatif jawaban ragu-ragu diberi nilai atau skor dua.
- 3) Untuk alternatif jawaban setuju diberi nilai atau skor tiga

Adapun kisi-kisi angket adalah sebagai berikut:

Petunjuk Pengisian

Berikan tanda pada angka 1–3 sesuai pendapat Anda: 1 = Tidak Setuju, 2 = Ragu-ragu , 3 = Setuju.

Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Angket Isu Politik

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Deskripsi	Skala Penilaian	Jumlah Item
Isu Politik (X)	Isu politik sebagai masalah	Kesadaran terhadap isu politik publik	Kemampuan mahasiswa untuk menyadari keberadaan isu politik yang sedang berkembang di masyarakat	Likert (1–3)	8
		Pemahaman terhadap substansi isu politik	Mahasiswa tidak hanya terpapar isu politik, tetapi juga mampu memahami substansi, latar belakang, dan dampaknya.	Likert (1–3)	9
		Keterlibatan kognitif dalam isu politik	Ketertarikan dan keterlibatan mahasiswa secara intelektual dalam mengikuti dan mendiskusikan isu politik sebagai persoalan publik.	Likert (1–3)	6
	Literasi Politik	Pemahaman isu politik	Kemampuan mahasiswa dalam mengaitkan isu politik dengan peran negara seperti pemerintah		7

		Pemahaman isu politik dalam sistem hukum dan konstitusi	Kemampuan mahasiswa memahami isu politik yang berkaitan dengan aturan hukum, konstitusi, dan kebijakan publik.		
		Penilaian isu politik berdasarkan prinsip demokrasi	Kemampuan mahasiswa menilai isu politik dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kebebasan, dan hak warga negara.		
	Dimensi Kekuasaan	Pandangan terhadap relasi kekuasaan politik	Cara mahasiswa memandang isu politik sebagai hasil tarik-menarik kepentingan dan kekuasaan		
		Sikap terhadap kritik dan otoritas politik	Sikap mahasiswa terhadap kritik kebijakan pemerintah dan relasi antara warga negara dan penguasa.		
		Kemandirian sikap dalam menilai isu politik	Kemampuan mahasiswa bersikap kritis dan tidak semata-mata mengikuti opini mayoritas atau tekanan sosial		

	Isu Politik sebagai Kebijakan Publik	Pemahaman isu politik terkait kebijakan publik	Kemampuan mahasiswa memahami isu politik yang berkaitan dengan kebijakan publik dan dampaknya terhadap masyarakat.	Likert (1–3)	5
		Penilaian terhadap dampak kebijakan publik	Kemampuan mahasiswa menilai kebijakan publik berdasarkan manfaat atau dampaknya bagi kepentingan umum.		
		Kesadaran terhadap evaluasi dan aspirasi publik	Pemahaman mahasiswa bahwa kebijakan publik dapat dikritisi, dievaluasi, dan dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat.		

B. Tes

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes berbentuk pilihan ganda, yang bertujuan untuk mengukur tingkat *Civic Knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung. Tes ini disusun berdasarkan indikator kemampuan *Civic Knowledge* yang mencakup empat aspek utama, yaitu:

- (1) pemahaman prinsip-prinsip demokrasi,
- (2) pemahaman sistem politik dan pemerintahan Indonesia,
- (3) pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta
- (4) peran mahasiswa dalam kehidupan demokratis.

Tes ini digunakan untuk memperoleh data mengenai tingkat penguasaan

mahasiswa terhadap konsep-konsep kewarganegaraan serta kemampuan mereka dalam memahami dan menganalisis isu kebijakan publik yang aktual di Indonesia. Dengan demikian, hasil tes ini menjadi dasar dalam menilai variabel dependen (Y) yaitu *Civic Knowledge* mahasiswa, yang dihipotesiskan dipengaruhi oleh variabel independen (X) yaitu Isu Politik.

Tabel 4. Kisi-Kisi Tes *Civic Knowledge*

No.	Aspek	Indikator Soal	Bentuk Soal	No. Soal
1	Mengetahui	Mahasiswa dapat mengenali prinsip dasar demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.	Pilihan Ganda	1–2
2	Mengetahui	Mahasiswa dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara serta peranannya dalam sistem politik.	Pilihan Ganda	3–4
3	Memahami	Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara demokrasi Pancasila dengan praktik pemerintahan di Indonesia.	Pilihan Ganda	5–7
4	Memahami	Mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban warga negara sesuai UUD NRI Tahun 1945 serta kaitannya dengan kehidupan demokratis.	Pilihan Ganda	8–9

5	Menerapkan	Mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks sosial-politik kampus dan masyarakat.	Pilihan Ganda	10–13
6	Menerapkan	Mahasiswa dapat menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan publik atau isu politik yang berkembang di masyarakat.	Pilihan Ganda	14–17
7	Menganalisis	Mahasiswa dapat menganalisis pengaruh paparan isu politik nasional terhadap peningkatan atau penurunan civic knowledge mahasiswa.	Pilihan Ganda	18–21
8	Menganalisis	Mahasiswa dapat menilai peran media sosial sebagai sarana pembentukan kesadaran dan pengetahuan kewarganegaraan.	Pilihan Ganda	22–30

C. Wawancara

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2015) wawancara merupakan sebuah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat diperoleh inti yang akan menjadi kesimpulan dari sebuah topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan cara mengajukan beberapa pernyataan dan menyiapkan kisi-kisi wawancara, sehingga akan

dibutuhkan instrumen sebagai alat penunjang untuk mendapatkan data-data yang ingin diketahui oleh peneliti.

Adapun kisi-kisipedoman wawancara sebagai berikut:

Tabel 5. Tabel Pedoman kisi- kisi wawancara untuk isu politik

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1.	Isu Politik (X)	Isu politik sebagai masalah	1. Bagaimana kebiasaan Anda dalam mengikuti perkembangan isu politik sehari-hari? 2. Menurut Anda, faktor apa yang membuat Anda tertarik atau tidak tertarik mengikuti isu politik? 3. Apakah Anda lebih sering mengikuti isu politik karena sedang viral daripada karena substansinya
		Literasi Politik	1. Apakah menurut Anda mahasiswa yang memahami isu politik hanya sebatas mengikuti opini publik bisa dikatakan “melek politik”? Mengapa demikian? 2. Menurut Anda, apakah memahami isu politik justru membuat mahasiswa lebih kritis terhadap pemerintah atau malah lebih apatis? Mengapa demikian? 3. Menurut Anda, apakah memahami isu politik justru membuat mahasiswa lebih kritis terhadap pemerintah atau malah lebih apatis? Mengapa demikian?
		Dimensi Kekuasaan	1. Isu politik apa yang paling sering menarik perhatian

			Anda sebagai mahasiswa? Jelaskan dengan menyebutkan contoh isu atau kasus politik yang menurut Anda berkaitan dengan praktik kekuasaan dan penting untuk diketahui? 2. Apakah terdapat isu politik yang berkaitan dengan kekuasaan yang Anda anggap sulit untuk dipahami? Jelaskan alasan mengapa isu tersebut sulit dipahami, baik dari segi informasi, aktor, maupun dampaknya.
		Isu Politik sebagai Kebijakan Publik	1. Bagaimana sikap atau reaksi Anda ketika menghadapi isu politik yang berkaitan dengan kebijakan publik dan bersifat kontroversial atau berbeda dengan pandangan pribadi Anda? 2. Menurut pandangan Anda, sejauh mana mahasiswa perlu berperan aktif dalam menyuarakan pendapat terhadap isu politik yang berkaitan dengan kebijakan publik?

Tabel 6. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Kemampuan *Civic Knowledge*

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1.	<i>Civic Knowledge</i>	Pemahaman Demokrasi	1. Menurut Anda, bagaimana isu politik seperti perdebatan RUU di DPR mencerminkan prinsip check and balance antar lembaga negara? 2. Apakah isu politik terkait pemilu atau konflik antar lembaga negara membuat Anda lebih memahami praktik demokrasi di Indonesia? Bisa beri contohnya? 3. Menurut Anda, bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap kualitas demokrasi di Indonesia saat membahas isu politik tertentu?
		Sistem Politik & Pemerintahan	1. Menurut Anda, apakah DPR selalu mewakili aspirasi rakyat ketika membahas isu politik besar seperti Omnibus Law atau RUU KUHP? 2. Bagaimana pemberitaan isu politik tentang hubungan Presiden dan DPR memengaruhi pemahaman Anda tentang sistem pemerintahan Indonesia?
		Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara	1. Menurut Anda, bentuk partisipasi politik apa yang dapat dilakukan mahasiswa sebagai perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokratis saat ini?

			2. Bagaimana pemahaman Anda mengenai hak masyarakat dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah serta kewajiban untuk melakukannya secara bertanggung jawab?
		Pemahaman Informasi Politik dan Kebijakan	1. Menurut Anda, apakah mahasiswa lebih sering ikut-ikutan pendapat umum tentang kebijakan, atau benar-benar membaca dan memahami dulu? 2. Saat ada kebijakan baru (misalnya kenaikan harga BBM atau perubahan aturan kampus), apa yang biasanya pertama kali Anda perhatikan: isinya, dampaknya, atau komentar orang lain? 3. Menurut Anda, apakah mahasiswa bisa dikatakan kritis jika hanya mengkritik kebijakan tanpa tahu alasan kebijakan itu dibuat?

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data mempunyai dua tujuan: (1) untuk mengambil berbagai keputusan ketika mengumpulkan data dan (2) untuk mengidentifikasi tren dan pola (Sutriani, 2019). Langkah-langkah untuk mengidentifikasi data dan kemudian mengolah data tersebut. Sedangkan kelas informasi menggunakan rentang sebagai berikut.

A. Analisis Distribusi Frekuensi

Analisis distribusi frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari angket mata kuliah pendidikan generasi muda dan angket civic competence. Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klasifikasi beserta

persentase tingkat konten isu politik terhadap critical thinking dalam studi *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung.

Teknik analisis data menggunakan rumus interval yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam (Saputro et al., 2013) yaitu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = Nilai Rendah

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat presentase digunakan rumus presentase berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan

P = Besarnya presentase

F = Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden Untuk menafsirkan banyaknya presentase yang diperoleh digunakan kriteria

Notoatmodjo (2012) membuat kategori tingkat pengetahuan seseorang menjadi tiga tingkatan yang didasarkan pada nilai persentase yaitu sebagai berikut :

- a) Tingkat Pengetahuan kategori Baik = 75 - 100%
- b) Tingkat Pengetahuan kategori Cukup = 56 - 74%
- c) Tingkat Pengetahuan kategori Kurang = 10 – 55%

B. Uji Prasyarat Analisis

Tujuan dari uji prasyarat analisis adalah untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis memenuhi asumsi dasar yang diperlukan sehingga hasil analisis statistik dapat diterima dan dapat diandalkan.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian yang digunakan disajikan secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 25 untuk mengetahui koefisien signifikansi. Tes yang digunakan adalah *tes Kolmogorov Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan mengenai hasil tes yang dibakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) $> 0,05$, maka data penelitian berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$, maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas

Tujuan uji linearitas adalah untuk mengetahui linearitas hubungan antara masing-masing variabel penelitian. Teknik analisis data untuk menguji hubungan linear antar variabel yang satu dengan yang lain menggunakan uji signifikan F Linear atau tidaknya suatu hubungan dapat dilihat dari peluang galat (p) melalui harga (F) (Komara, 2016).

- 1) Hubungan kedua variabel dikatakan linier jika $p > 0,05$
- 2) Jika $p < 0,05$ maka sebaran tidak linier.
- 3) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan *valid*.
- 4) Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak *valid*.

Berdasarkan signifikansi:

- 1) Jika nilai signifikansi $\geq \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan tidak *valid*.
- 2) Jika nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka item dinyatakan *valid*.

C. Analisis Data

1. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif yang signifikan dari pengaruh isu politik (Variabel X) sebagai variabel bebas dan *civic knowledge* (Variabel Y) sebagai variabel terikat. Uji hipotesis dilakukan menggunakan SPSS versi 27 berdasarkan hasil uji analisis regresi linear sederhana untuk memperoleh koefisien signifikannya. Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.) < 0,05, maka terdapat pengaruh isu politik (X) terhadap *civic knowledge* (Y).
- 2) Jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh isu politik (X) terhadap *civic knowledge* (Y).

a. Uji Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2017) regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen variabel dependen. Dalam penelitian ini akan diujikan menggunakan rumus linieritas maka pada penelitian ini akan menggunakan daftar analisis varian (*anova*) dengan ketentuan apabila $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ pada taraf 0,05 dengan dk pembilang (k-2) penyebut (n-k), maka regresi linear.

Data hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat isu politik (Variabel X) terhadap *civic knowledge* mahasiswa PPKn Universitas Lampung (Variabel Y), adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = subjek variabel terikat yang diprediksikan

X = variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu

a = harga Y bila $X = 0$ (harga konstan)

b = Nilai arah atau nilai koefisien regresi

(Sugiyono, 2019)

Demi kemudahan dalam uji regresi linear sederhana, peneliti menggunakan SPSS versi 25. Regresi linier sederhana juga digunakan untuk melihat apakah variabel bebas (X) mampu secara menyeluruh (stimulan) menjelaskan tingkah laku variabel terikat (Y) dengan kriteria Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada hubungan linier secara signifikan antara variabel (X) dan (Y). Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang linier antar variabel (X) dan (Y).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa isu politik berpengaruh secara signifikan terhadap *civic knowledge* mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Lampung. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji regresi linier sederhana yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 10,075 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh isu politik terhadap *civic knowledge* mahasiswa dinyatakan diterima.

Besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,617 atau 61,7%. Artinya, isu politik mampu menjelaskan 61,7% variasi *civic knowledge* mahasiswa, sedangkan 38,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap isu politik, khususnya isu politik nasional yang berkembang melalui media sosial dan media massa, berkontribusi dalam memperkuat pengetahuan kewarganegaraan mahasiswa. Mahasiswa yang memahami isu politik secara lebih mendalam cenderung mampu mengaitkan konsep demokrasi, sistem politik dan pemerintahan Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara dengan realitas politik yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, isu politik terbukti memiliki kontribusi yang cukup kuat terhadap *civic knowledge* mahasiswa, meskipun masih terdapat faktor lain di luar penelitian ini yang turut memengaruhinya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas

Universitas diharapkan dapat terus mendukung penguatan *civic knowledge* mahasiswa melalui kebijakan akademik yang mendorong pengembangan literasi politik dan pemikiran kritis, seperti penyediaan forum diskusi ilmiah, seminar kebangsaan, serta kegiatan akademik yang mengaitkan isu politik aktual dengan nilai-nilai kewarganegaraan.

2. Bagi Program Studi

Bagi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lampung diharapkan dapat mengintegrasikan isu-isu politik aktual secara lebih sistematis dan *civic knowledge* mahasiswa dapat meningkat.

3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif dan kritis dalam menyikapi isu politik yang diakses melalui berbagai media, dengan cara meningkatkan kemampuan menyaring informasi, memahami konteks isu secara mendalam, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai dan konsep *civic knowledge* sebagai bekal dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab solichin. 1997. Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarata: Edisi Kedua, Bumi
- Abraham H Maslow, 2000, Agama, Nilai dan Pengalaman Puncak, terj. Agus Cremers dan Donatus Sermada. Lembaga Penerbit Pendidikan Berlanjut Arnoldus, Flores, hlm. 61.
- Adha, M., & Perdana, D. R. 2020. Pendidikan kewarganegaraan.
- Adha, M. M. (2015). Pendidikan kewarganegaraan mengoptimalkan pemahaman perbedaan budaya warga masyarakat Indonesia dalam kajian manifestasi pluralisme di era globalisasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2).
- Alfred North Whitehead, 2010, Fungsi Rasio, terj. Alois Agus Nugroh Kanisius, Yogyakarta, him. 31.
- Adnan, M. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Teori dan Praktik Demokrasi. RajaGrafindo Persada.
- Adnan. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Demokrasi. Prenada Media.
- Adnan. 2005. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Global. Prenada Media.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Badridduja, Faiz, Sidda Elvida, and Eva Latipah. "Analisis Kemampuan Bernalar dan Berpikir Kritis (Studi Komparatif antara Accountable Talk dan Higher Order Thinking Skill)." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3.4 2022: 469249.

- Belladonna, Aprillio Poppy, and Selly Novia Anggraena. "Penguatan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2019: 196-210.
- Branson, M. S. 1998. *The role of civic education*. Calabasas, CA: Center for Civic Education.
- Budimansyah, D. 2008. Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen). *Acta Civicus*,
- Bungin, B. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Brownhill, R. J., & Smart, P. 1989. *Political Education*. London: Routledge.
- Cumming, Milton C. Jr and David Wise, 1985. *Democracy Under Pressure: An Introduction to the American Political System*. San Diego - New York: Harcourt Brace Jovanovich. Publisher.
- Crick, B. 2000. *Essays on Citizenship*. London: Continuum.
- Darmayanti, Reni, et al. "Peran Media Sosial dalam Pengembangan Literasi Digital di Kalangan Mahasiswa." *Seminar Nasional Paedagogia*. Vol. 4. No. 1. 2024.
- Fanz Magnis Suseno, 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 64.
- Febrianti, Nurul, and Cecep Darmawan. "Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi Terhadap Civic Responsibility Pada Mahasiswa." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 15.2 2016: 1-16.
- Gustina Romaria Finy F. Basarah, "Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial," *JAM: Jurnal Abdi Masyarakat* vol. 5, no. 2 2020. hal. 24.
- Ilmu Politik Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kasdin Sihotang, 2009, *Filsafat Manusia: Upaya Membangkitkan Humanisme*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 15-16.
- Kasdin Sihotang, et al., 2012, *Critical Thinking: Membangun Pemikiran Logis, Sinat Harapan*, Jakarta, hlm. 2.
- Louis O. Kattsoff, 2004, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 34-37.

- Margaret, B. 1999. The Role of Civic knowledge in Democracy. ERIC Digest.
- Margaret, S. 1999. Citizenship Education in the Classroom: Principles and Practice. David Fulton Publishers.
- Ningrum, Ayu Jelita. Pengembangan model pembelajaran controversial public issues untuk meningkatkan kemampuan critical democracy pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Universitas Negeri Malang. Diss. Universitas Negeri Malang, 2022.
- Nurmalisa, Y., Mentari, A., & Rohman, R. 2020. Peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun civic conscience. *Bhineka Tunggal Ika*, 7(1), 34-46.
- Putri, D. S., & Yanzi, H. (2020). Analisis kepekaan sosial generasi (z) di era digital dalam menyikapi masalah sosial. *Bhineka Tunggal Ika*, 7(1), 17-23.
- Ranney, Austin. 1990. Governing. An Introduction to Political Science. New Jersey: Prentice Hall. Englewood Cliffs.
- Regeher, M., & Larkin, J. 2003. Risk Issues and Crisis Management, A Case Book of Best Practice Fourth Edition. London: Chartered Institute of Public Relations and Kogan Page
- Russel, Greg. 2001. "Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi: Amerika dan Negara-negara Lain" dalam Demokrasi. Office of International Information Programs. Department of State.
- Sastroatmodjo. 1995. Perilaku Politik. Semarang: Ikip Semarang Press.
- Shelina, N., Yanzi, H., & Mentari, A. 2019. Peran Pembelajaran PPKn dalam Membentuk Sikap Demokratis untuk Meningkatkan Civic Disposition Siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*
- Stephen L Carter, 1999, Integritas, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.10.
- Sugiyono. 2018, 2019, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso. 2009. *Kajian Civic knowledge dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Diakses dari <https://eprints.umpo.ac.id/5526/3/BAB%202.pdf>
- Sukmayadi, Trisna, et al. "Membangun keterampilan berpikir kritis mahasiswa melalui literasi kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan." *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran* 12.2 (2024): 245-256.

Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Edisi Keempat). Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.

Yusuf, M. (2014). *Metodologi Penelitian*.